



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dalam aspek pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, desa perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja Kepala Desa;

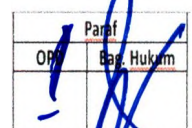
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

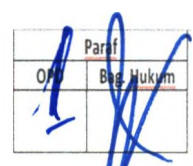
OPD	Paraf
	Bag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);





9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

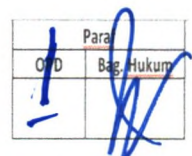
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Paraf	
Orang	Bag. Hukum



4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato selanjutnya disingkat dengan BKD;
5. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
9. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diangkat oleh Bupati Pohuwato dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Bantuan keuangan khusus adalah peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
13. Tunjangan Kinerja Kepala Desa yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tunjangan Kinerja bagi Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang merupakan suatu bentuk penghargaan atau reward Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas tingkat pencapaian pelayanan publik dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.



14. Penilaian Sasaran Kerja adalah penilaian secara sistimatis yang penekanannya pada tingkat capaian hasil kerja pada bulan berkenaan yang menjadi kewajiban Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa untuk dilaksanakan.

15. Penilaian Perilaku Kerja adalah penilaian secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja atas tingkah laku, sikap dan tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

## Pasal 2

Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab.

## Pasal 3

Pemerintah Desa menganggarkan Tunjangan Kinerja Kepala Desa pada setiap Desa di Kabupaten Pohuwato dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang di peruntukkan untuk pembayaran tunjangan kepada Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

## BAB II

### BESARAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA

## Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada setiap desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

OP	Para
	Bag. Hukum



- (3) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 5


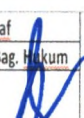
- (1) Penganggaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan yang obyektif berdasarkan pada Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa.

### BAB III

#### TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak Bulan Januari 2021 yang dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil penilaian oleh Camat yang disampaikan kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Pohuwato sebagai dasar penyaluran dana bantuan keuangan khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa.
- (3) Hasil penilaian oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OP	Bag. Hukum
	

BAB IV  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 7

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Tunjangan Kinerja Kepala Desa yang disalah gunakan.

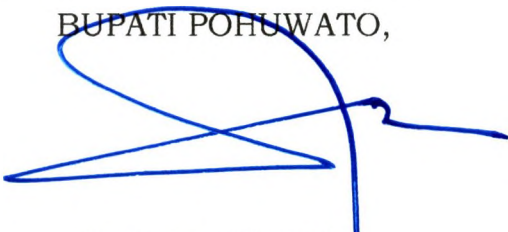
BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato .

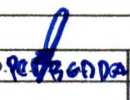
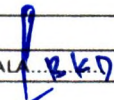
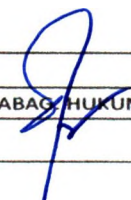


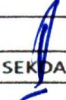
Ditetapkan di Marisa  
Pada Tanggal 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
Pada Tanggal 5 Januari 2021  
Plt, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato,

  
ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 8.

PARAF KOORDINASI						
KABID. PERBENDAHARAAN	KEPALA BUDAYA	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA  
DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021.

---

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan desa yang menjadi bagian dari pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sangat dibutuhkan optimalisasi peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Melalui penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang kewenangan desa dan pelaksanaan skala prioritas program pembangunan desa yang menjadi bagian dari prioritas program pembangunan daerah dan nasional, untuk itu peran kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya menjadi sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa tersebut tentunya harus di imbangi dengan kesesuaian terhadap penghasilan tetap kepala desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga. Hal ini tidak dapat dilakukan penyesuaian untuk kenaikan penghasilan tetap

OPD	Paraf
	Bag. Hukum

kepala desa karena akan melebihi 30% dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan untuk mensukseskan program pembangunan desa yang menjadi bagian dari pembangunan daerah untuk menaikkan penghasilan tetap Kepala Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa. Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa merupakan suatu bentuk penghargaan atau reward Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pelayanan publik atas pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Memberikan penghargaan atau reward dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pelayanan publik atas pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan desa berdasarkan indikator penilaian yang rasional, terukur, relevan dan dapat dicapai serta memiliki target waktu.
- b. Meningkatkan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan desa.

2. TUJUAN

- a. Terlaksananya kinerja pelayanan publik Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
- b. Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi skala prioritas pembangunan desa yang menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- c. Membangun budaya Integritas dan komitmen anti korupsi melalui peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

1	Paraf
ORI	Bag. Hukum



### III. INDIKATOR PENILAIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN/ATAU PENJABAT KEPALA DESA

Indikator penilaian untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dilakukan berdasarkan indikator yang terukur dan rasional, adalah sebagai berikut :

#### 1. Indikator dan Bobot Indikator

##### a. Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Bobot : 60%

Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dapat ditambahkan oleh Camat berdasarkan kewajiban tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang di sesuaikan dengan bulan berkenaan untuk pencapaian target atas sasaran kerja.

##### b. Perilaku Kerja, Bobot : 40%

Perilaku kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, terdiri dari Orientasi pelayanan, Integritas, Disiplin, Kerjasama, Komitmen dan Kepemimpinan.

#### 2. Sub Indikator

##### a. Sub Indikator Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

- 1) Administrasi Desa lengkap, benar dan valid secara berkala
- 2) Telah ditetapkannya Perdes RPJM Desa, RKP Desa
- 3) Telah menyampaikan DU RKP Desa ke Camat
- 4) Telah ditetapkannya Perdes BUM Desa
- 5) Peraturan-Peraturan Desa telah di evaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan
- 6) Progres capaian target PBB P2.
- 7) Laporan-Laporan Kepala Desa

Laporan-laporan kepala desa, diantaranya terdiri dari :

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) TA. 2020 kepada Bupati melalui Camat (paling lambat bulan Maret 2021)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ) Kepada Bupati melalui Camat (paling lambat 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan)
- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) TA. 2020 kepada BPD (paling lambat bulan Maret 2021)
- LRA setiap triwulan telah disampaikan ke Camat
- LRA semester I TA. 2021 (paling lambat Bulan Juli 2021)

OPD	Paraf
1	Bag. Hukum

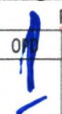
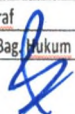
- Laporan penyerapan anggaran atas pelaksanaan bidang kegiatan secara berkala yang telah dievaluasi oleh Fasilitator Pendampingan Desa Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan
- 8) Pelaksanaan Tugas Tambahan yang diberikan oleh Camat (pemberian tugas tambahan oleh camat di integrasikan dengan kewajiban pemerintah desa kepada SOPD terkait)

b. Sub Indikator Perilaku Kerja

- 1) Orientasi pelayanan : dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan, baik untuk pelayanan di kantor desa maupun diluar kantor desa.
- 2) Integritas : konsistensi kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, keyakinan dan prinsip.
- 3) Disiplin : mematuhi kewajiban kehadiran disetiap rapat-rapat, kegiatan keagamaan/adat dan kegiatan resmi lainnya.
- 4) Kerjasama : kemampuan bersinergi, menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.
- 5) Komitmen :Melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan visi dan misi organisasi
- 6) Kepemimpinan : kemampuan mengatur, membina dan menjalankan fungsi transfer edukasi serta loyalitas untuk mencapai tujuan organisasi.



#### IV. Tata Cara Penilaian

1. Penilaian Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi setiap bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.
2. Khusus penilaian pada Bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 22 Desember 2021.
3. Dalam hal sasaran kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu maka penilaian didasarkan oleh pertimbangan kondisi penyebabnya.

	Paraf
Or	Bag. Hukum
	



4. Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dapat ditambahkan oleh Camat berdasarkan kewajiban tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang di sesuaikan dengan bulan berkenaan untuk pencapaian target atas sasaran kerja.
5. Jika sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak dapat dipenuhi sesuai point 3 diatas maka menjadi bilangan pengurang sesuai sub indikatornya secara terus menerus sampai akhir tahun anggaran.
6. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan melalui pengamatan oleh Camat.
7. Camat dalam melakukan penilaian Perilaku Kerja, dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat lain atau masyarakat desa.
8. Penilaian dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian Indikator Sasaran Kerja dan Indikator Perilaku Kerja.
9. Penilaian akhir Kinerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa :
  - a. 91 - keatas : Kinerja Sangat Baik
  - b. 76 – 90 : Kinerja Baik
  - c. 61 – 75 : Kinerja Cukup
  - d. 51 – 60 : Kinerja Kurang
  - e. 50 kebawah : Kinerja Buruk
10. Dalam hal Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang dinilai, keberatan atas hasil penilaian Camat maka Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang dinilai dapat mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasannya kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian dari Camat.
11. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian yang disampaikan untuk meminta penjelasan kepada camat dan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang dinilai.
12. Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, dapat menetapkan hasil penilaian oleh Camat atau melakukan atau melakukan perubahan penilaian oleh Camat dan bersifat final.
13. Format penilaian sebagaimana terlampir.

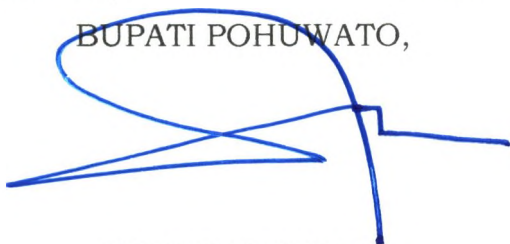
Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

V. Penutup

Demikian Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagai penyempurnaan ketentuan ini.

Marisa, 2021

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						



CONTOH FORMAT :

**HASIL PENILAIAN KINERJA KEPALA DESA DAN /ATAU PENJABAT KEPALA DESA .....**  
**BULAN ..... TAHUN 2021**

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA INDIKATOR	BOBOT	BESARAN TUNJANGAN KINERJA	REWARD	KET.
1	SASARAN KERJA	87%	60%	Rp. 1.000.000,-	Rp. 522.000,-	Reward ini belum termasuk perhitungan kewajiban PPh 21
2.	PERILAKU KERJA	100%	40%	Rp. 1.000.000,-	Rp. 400.000,-	
<b>JUMLAH TUNJANGAN KINERJA</b>					<b>Rp. 922.000,-</b>	

....., ..... 2021

PENILAI :

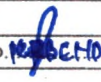

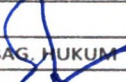



**CAMAT .....**

**ttd**

.....

BUPATI PONUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. ....	KEPALA... ..	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

CONTOH FORMAT :

**PENILAIAN KINERJA KEPALA DESA DAN/ATAU PENJABAT KEPALA DESA .....  
BULAN ..... TAHUN 2021**

NO	INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR		TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN
1	<b>SASARAN KERJA</b>				
	1.	Administrasi Desa lengkap, benar dan valid secara berkala	100 %	75%	75%
	2.	RPJMDesa, RKPDesa telah sesuai dan benar serta telah dievaluasi oleh BAPPEDA Kab. Pohuwato sebelum ditetapkan	100 %	75%	75%
	3.	Peraturan-Peraturan Desa telah di evaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan	100 %	50%	75%
	4.	Progres capaian target PBB P2	100 %	100%	100%
	5.	Laporan-Laporan Kepala Desa	100 %	95%	95%
	6.	Pelaksanaan Tugas Tambahan (dirinci)	100 %	100%	100%
	<b>Nilai Capaian Rata - Rata Sasaran Kerja</b>				<b>87%</b>
2	<b>PERILAKU KERJA</b>				
	1.	Orientasi pelayanan	100%	100%	100%
	2.	Integritas	100%	100%	100%
	3.	Disiplin	100%	100%	100%
	4.	Kerjasama	100%	100%	100%
	5.	Komitmen	100%	100%	100%
	6.	Kepemimpinan	100%	100%	100%
	<b>Nilai Capaian Rata - Rata Perilaku Kerja</b>				<b>100%</b>

.....,..... 2021

**PEJABAT YANG DINILAI**  
**KEPALA DESA .....**

Ttd

.....

**PENILAI**  
**CAMAT .....**

ttd

.....

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP